JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

INTEGRASI DATA KEMISKINAN MENUJU CILEGON SEJAHTERA

POVERTY DATA INTEGRATION TOWARDS PROSPEROUS CILEGON

Hendra Cipta
Bapppedalitbang Kota Cilegon, Jl. Buyut Arman No.1 Citangkil Cilegon, 42441
E-mail : Hencipta77@gmail.com

disubmit: 8 Mei 2025, direvisi: 12 Juni 2025, diterima: 17 Juni 2025

ABSTRAK

Isu kemiskinan menjadi permasalahan utama dalam pembangunan nasional, termasuk di Kota Cilegon. Program penanggulangan kemiskinan memerlukan sistem data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi guna menjamin ketepatan sasaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan validitas data penerima manfaat program perlindungan sosial, mengurangi tumpang tindih dan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan, mewujudkan sistem "satu data kemiskinan nasional" yang terintegrasi dan terstandar antar lembaga, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama integrasi data terletak pada perbedaan metodologi antar instansi, lemahnya pembaruan data di daerah, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, integrasi data terbukti meningkatkan akurasi sasaran, mengurangi duplikasi, serta memperkuat efektivitas program sosial. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem informasi digital terpadu, standardisasi metodologi nasional, serta penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip Satu Data Indonesia untuk mendukung kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Integrasi data kemiskinan, DTKS, P3KE, Satu Data Indonesia.*

ABSTRACT

The issue of poverty is a major problem in national development, including in Cilegon City. Poverty reduction programmes require a valid, up-to-date, and integrated data system to ensure accuracy of targeting. The purpose of this research is to improve the accuracy and validity of data on beneficiaries of social protection programmes, reduce overlaps and targeting errors in the distribution of assistance, realise an integrated and standardised 'one national poverty data' system between institutions, support data-based policy making in an effort to accelerate poverty reduction, especially extreme poverty. This research uses a descriptive qualitative approach. The results show that the main challenges of data integration lie in differences in methodology between agencies, weak data updates in the regions, limited information technology infrastructure, and low community participation. However, data integration is proven to improve targeting accuracy, reduce duplication, and strengthen the effectiveness of social programmes. This research recommends the implementation of an integrated digital information system, standardisation of national methodologies, and strengthening the capacity of human resources and regional infrastructure. The findings emphasise the importance of implementing the One Data Indonesia principle to support targeted and sustainable social protection policies.

Keywords*: Poverty data integration, DTKS, P3KE, One Data Indonesia.*

Hendra Cipta (2025). Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 9(1), 48–63.
https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.367

© Penulis | Penerbit: Bappeda Provinsi Banten
Lisensi: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk dalam 189 negara yang berkomitmen pada program aksi internasional untuk memberantas kemiskinan, memperkecil ketimpangan, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs-Sustainable Development Goals*). Berdasakan 17 sasaran pembangunan berkelanjutan yang telah disepakati bersama secara global, salah satunya adalah menghilangkan kemiskinan di manapun dalam bentuk apapun (SDGs no.1) (Ulita & Wati, 2024).

Kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan integrasi kemiskinan dibutuhkan untuk meningkatkan akurasi penerima manfaat serta mengurangi mistargeting, melalui pendataan “by name by address” dan desil yang lebih tepat sasaran (Widyaningsih et al., 2023).

Fenomena kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang dihadapi mayoritas negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berimplikasi luas terhadap kemajuan pembangunan. Efek negatif kemiskinan tidak hanya termanifestasi dalam konteks sosial, melainkan juga mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Keberadaan kemiskinan meningkatkan beban biaya pembangunan ekonomi yang berpotensi menghentikan momentum pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kemiskinan berdampak signifikan terhadap efisiensi produktivitas, pola distribusi penghasilan, dan kapasitas sumber daya manusia. Permasalahan kemiskinan juga terintegrasi dengan berbagai masalah sosial seperti deteriorasi sistem pelayanan kesehatan, intensifikasi aktivitas kriminal di daerah perkotaan, dan problematika sosial lainnya. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan membutuhkan intervensi komprehensif yang mencakup semua elemen kehidupan bermasyarakat.

Isu kemiskinan terus menjadi permasalahan pokok pembangunan nasional Indonesia, termasuk yang dialami Kota Cilegon. Implementasi program pengentasan kemiskinan membutuhkan basis data yang valid dan terintegrasi guna menjamin ketepatan targeting bantuan sosial. Akan tetapi, kesulitan dalam mengintegrasikan data kemiskinan masih menjadi hambatan yang serius.

Salah satu faktor yang paling penting dalam keberhasilan program bantuan sosial diperlukan data yang akurat dan terintegrasi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, permasalahan dalam integrasi data integrasimasih tetap menjadi tantangan yang signifikan (Widyaningsih et al., 2023).

Masalah utama yang dihadapi adalah adanya ketidakselarasan dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

ketidakakuratan informasi dalam sistem-sistem yang terpisah, seperti yang terjadi antara database DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan P3KE (Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam proses seleksi dan pengeluaran penerima bantuan sosial. Studi yang dilakukan Widyaningsih membuktikan bahwa ketidakrutinan pemerintah daerah dalam melakukan pembaruan data DTKS telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam program perlindungan sosial (Novitri et al., 2024).

Evaluasi Bappenas menunjukkan ketidakakuratan dan duplikasi data menyebabkan program kemiskinan ekstrem tidak tepat sasaran, dengan sebagian yang layak tidak tercatat dan yang lain terdaftar di sistem multipleks. Hal ini menekankan pentingnya integrasi data antar lembaga untuk menciptakan basis data tunggal yang akurat, meskipun masih terhambat dualisme kewenangan BPS-Kemensos, gap teknologi, dan isu keamanan data (Sugandi, 2025).

Di Kota Cilegon, kondisi ini berdampak pada efektivitas program kemiskinan karena kurangnya integrasi data menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam dan perumusan strategi kebijakan untuk sistem data terintegrasi yang mendukung pengentasan kemiskinan efektif di daerah (Alatas, 2024).

Beberapa alternatif solusi dalam pengentasan kemiskinan adalah melakukan integrasi data antar pemangku kepentingan, saat ini di Kota Cilegon belum tersedia Sistem Terpadu dalam pengentasan kemiskinan, sehingga memungkinkan terjadinya duplikasi dan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial dan bantuan lainnya.

Implementasi sistem informasi seperti garis haluan (*platform*) BANGKIT yang terdapat di Kabupaten Majalengka yang dirancang untuk proses validasi dan memperbarui data kemiskinan dapat menjadi alternatif solusi yang aplikatif. *Platform* ini memfasilitasi monitoring kondisi sosial ekonomi secara real-time, sehingga memungkinkan formulasi kebijakan bantuan sosial yang lebih responsif terhadap perubahan dinamis. Adopsi sistem informasi berbasis indikator multidimensional terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi targeting program penanggulangan kemiskinan (Amirudin et al., 2024).

Kebaharuan penelitian ini adalah penggunaan Integrasi Data Terpadu Kemiskinan yang memfasilitasi penggabungan informasi dari beragam basis data, termasuk DTKS dan P3KE. Penerapan *platform* tersebut telah terbukti memberikan manfaat signifikan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengawasi sinergi dan mengukur keberhasilan program-program anti kemiskinan. Melalui konsolidasi data ini, teridentifikasi adanya 78.583 warga yang terdaftar dalam DTKS Desil 1 namun tercatat dengan status tanpa intervensi program sama sekali, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem distribusi bantuan sosial yang perlu diperbaiki. Temuan ini menunjukkan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

pentingnya integrasi data untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pelayanan dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan (Humas Menpan RB, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan akurasi dan validitas data penerima manfaat program perlindungan sosial, mengurangi tumpang tindih dan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan, mewujudkan sistem "satu data kemiskinan nasional" yang terintegrasi dan terstandar antar lembaga, mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam integrasi data kemiskinan di Kota Cilegon. Metode ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meneliti fenomena secara mendalam dan komprehensif dalam konteks yang sebenarnya melalui komunikasi langsung dengan narasumber dan observasi di lokasi penelitian (Yuliani Wiwin, 2018).

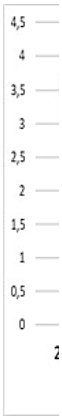
Populasi penelitian melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan data kemiskinan, seperti Dinas Sosial, Bappeda, operator DTKS dan P3KE, serta tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka dalam proses integrasi data (Ani et al., 2021).

Data diperoleh dari sumber primer (wawancara mendalam dan observasi lapangan) dan sekunder (dokumen resmi, kebijakan, dan data statistik). Teknik analisis data menggunakan analisis tematik, dimulai dari reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan tema yang muncul. Untuk menjamin validitas data, diterapkan triangulasi sumber dan metode serta konfirmasi hasil (*member checking*) kepada informan. Pendekatan ini sesuai untuk menggali masalah integrasi data kemiskinan yang kompleks, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang lebih tepat dan terarah (Zulfah et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Luas Wilayah Kota Cilegon mencakup 163,45 Km2 yang tersebar menjadi 8 kecamatan dan 43 kelurahan. Dari semua kecamatan yang ada, Kecamatan Ciwandan memiliki area paling luas dengan 33,36 Km2, yang setara dengan seperlima (20,5%) dari total wilayah Kota Cilegon. Tingkat kepadatan penduduk di kota ini bertambah dari 2.893 orang per km2 di tahun 2023 menjadi 2.955 orang per km2 di tahun 2024. Pada tahun 2024 kepadatan penduduk di delapan kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jombang dengan tingkat kepadatan 7.084 jiwa/km2.



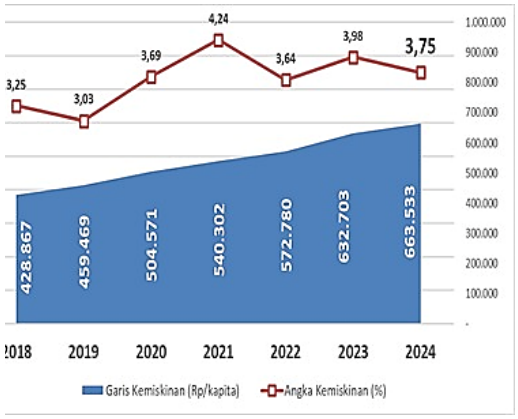
Gamb
Kemis
Cilego

Berdasarkan informasi dari catatan kependudukan yang disediakan oleh

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, populasi Kota Cilegon pada tahun 2024 mencapai 480.378 individu. Terdiri dari 50,59% (243.024 orang) pria dan 49,41% (237.354 orang) wanita. Terdapat peningkatan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,13%, yang menunjukkan terjadinya percepatan pentumbuhan penduduk jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada tahun 2023 yang sebesar 2,03%.

Secara umum, tingkat kemiskinan Kota Cilegon masih dibawah Provinsi Banten dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kab/Kota se-Provinsi Banten, Kota Cilegon merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah ke-2 setelah Kota Tangerang Selatan. Urutan Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten seperti ditunjukkan pda Gambar 1.



ar 1. Tingkat Kemiskinan (%) dan Garis skinan Tahun 2018-2024. Sumber: (BPS Kota on, 2025)

Karaktaresistik DTKS dan P3KE
Konsep Data DTKS

Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI menjalankan DTKS yang menyimpan informasi tentang individu dan keluarga yang memerlukan layanan sosial, benefisiari program bantuan dan pemberdayaan, serta sumber daya dan potensi kesejahteraan sosial. Sistem data ini dijadikan referensi primer dalam distribusi program-program bantuan sosial seperti PKH, Program Sembako, dan Program Induksi Sosial (Wardah & Muhammad, 2023).

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembaruan dari Peraturan Kemensos nomor 5 Tahun 2019 adalah Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam peraturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan untuk memastikan bahwa data itu tepat dan dapat diandalkan ketika digunakan untuk bantuan sosial.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kementerian Sosial ditugaskan untuk mengelola data fakir miskin di tingkat nasional, Dinas Sosial Provinsi mengelola data fakir miskin di tingkat provinsi, dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota mengelola data fakir miskin di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Cilegon selaku Pengelola data DTKS tingkat Kota Cilegon.

DTKS menggabungkan berbagai sumber data seperti informasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, serta kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan integratif ini, DTKS mampu menyajikan gambaran yang lebih menyeluruh dan akurat tentang kondisi

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

sosial-ekonomi warga yang membutuhkan bantuan. Proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara digital melalui sistem DTKS Online, yang kemudian dianalisis oleh Dinas Sosial untuk menetapkan calon penerima manfaat.

DTKS berperan penting sebagai basis data utama dalam penentuan penerima manfaat berbagai program bantuan sosial di Indonesia. Keakuratan dan pembaruan data secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan (Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DIY, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Cilegon Per Desember 2024, maka di peroleh data per Kecamatan sebagai berikut :

Sumber : (Dinas Sosial Kota Cilegon, 2024).

Tabel 1. Jumlah Data DTKS per Kecamatan Se Kota Cilegon Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah (Jiwa)	Kepala Keluarga (KK)
Cibeber	17.709	6.681
Cilegon	12.390	4.804
Citangkil	24.586	9.250
Ciwandan	22.813	8.653
Grogol	11.718	4.698
Jombang	16.905	6.752
Pulomerak	17.977	7.123
Purwakarta	10.927	4.328
Jumlah	135.025	52.289

Sumber: Dinas Sosial Kota Cilegon (2024)

Jumlah tertingi Jumlah Jiwa adalah Kecamatan Citangkil sebesar 24.586 Jiwa dan terendah adalah Kecamatan Purwakarta sebesar 10.927 Jiwa dari Jumlah Jiwa 135.025 Jiwa, Sedangkan dari Jumlah Kepala Keluarga tertinggi adalah Kecamatan Citangkil sebesar 9.250 KK dan terendah adalah Kecamatan Purwakarta sebesar 4.328 KK dari Total Keluarga 52.289 KK.

Konsep Data P3KE.

Inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai Target P3KE bertujuan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengembangkan program ini sebagai tanggapan atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Aryani, 2024).

Data P3KE adalah sistem data yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Data ini bersifat *by name by address* dan mencakup informasi sosial-ekonomi keluarga serta peringkat kesejahteraan mereka. Data P3KE merupakan hasil pemutakhiran dari Pendataan Keluarga 2021 oleh BKKBN, yang kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dianalisis menggunakan metode *Proxy Means Testing (PMT*). Metode ini memperkirakan kondisi sosial-ekonomi keluarga berdasarkan variabel seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, dan kepemilikan aset.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

Dalam Kepmenko PMK 30 Tahun 2022, data P3KE menjadi sumber data rujukan yang dipakai untuk penentuan sasaran penerima manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan dan program bantuan sosial lainnya. Implementasi P3KE memerlukan data pemerintah daerah yang dikumpulkan dan disinkronkan dengan data nasional. Portal resmi P3KE, *P3ke.kemenkopmk.go.id*, berfungsi untuk menyediakan data yang diperlukan untuk perencanaan dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

Dengan menggunakan pendekatan berbasis data yang terintegrasi, P3KE diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024 (Sujoko, 2024).

Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi jumlah data penduduk yang disandingkan dengan data DTKS dan P3KE di Kota Cilegon. Tabel 2 menunjukkan jumlah data

Tabel 2. Jumlah Data P3KE dan DTKS per Kecamatan Se Kota Cilegon

Kecamatan	P3KE	DTKS	Irisan
Cibeber	12.242	17.709	5.219
Cilegon	9.018	12.390	3.704
Citangkil	26.581	24.586	119
Ciwandan	20.035	22.813	43
Grogol	9.241	11.718	50
Jombang	14.116	16.905	135
Pulomerak	14.810	17.977	3.340
Purwakarta	6.601	10.927	17
Jumlah	112.644	135.025	12.627

Sumber: Kemenko PMK, (n.d.), Dinas Sosial Kota Cilegon (2024)

P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dan jumlah insan penerima manfaat di setiap kecamatan di Kota Cilegon. Secara keseluruhan, tercatat 112.644 data P3KE, 135.025 data DTKS, dan 12.627 insan penerima manfaat. Kecamatan Citangkil menempati posisi tertinggi pada seluruh kategori, yaitu dengan 26.581 data P3KE, 24.586 data DTKS, dan 119 insan penerima manfaat, mencerminkan tingginya konsentrasi penduduk miskin dan rentan di wilayah tersebut. Sebaliknya, Kecamatan Grogol dan Purwakarta mencatat jumlah paling rendah baik dalam P3KE maupun DTKS, masing-masing hanya sekitar 9.000-an. Data ini menunjukkan ketimpangan distribusi kesejahteraan antar wilayah di Kota Cilegon, yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan intervensi sosial dan penargetan program pengentasan kemiskinan secara lebih tepat sasaran, terutama pada wilayah dengan jumlah insan penerima manfaat yang signifikan seperti Cibeber dan Pulomerak.

Perbedaan DTKS dan P3KE

Pemerintah menggunakan dua mekanisme data utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, yaitu DTKS dan P3KE, yang masing-masing memiliki karakteristik dan strategi yang berbeda-beda. DTKS yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial berfungsi sebagai basis data acuan untuk mendistribusikan berbagai program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sistem ini mengumpulkan dan memvalidasi informasi melalui keterlibatan pemerintah daerah dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

masyarakat (Lasari & Ali, 2024).

Di sisi lain, P3KE merupakan program yang diprakarsai oleh Koordinator Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan target khusus mengeliminasi kemiskinan dalam kategori ekstrem. Sistem P3KE mengintegrasikan data secara nasional dengan memanfaatkan informasi kependudukan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta menargetkan 40% populasi dengan kondisi ekonomi paling rendah. Platform ini menggabungkan informasi dari berbagai instansi pemerintah untuk menghasilkan penilaian tingkat kesejahteraan yang lebih menyeluruh dan tepat sasaran.

Secara ringkas, DTKS menggunakan pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dan bersifat lokal, sementara P3KE fokus pada pengintegrasian data dan mencakup informasi tingkat nasional untuk mendukung strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang lebih efektif dan tepat sasaran.

DTKS memiliki kekuirangan seperti ketidaktepatan sasaran bantuan, data yang tidak mutakhir, dan lambatnya pemutakhiran yang bergantung pada usulan daerah. Kurangnya integrasi dengan NIK, minimnya pemanfaatan teknologi, serta rendahnya partisipasi masyarakat turut memengaruhi validitas dan efektivitas program sosial. Pengelolaan DTKS di tingkat daerah sering terkendala oleh kekurangan infrastruktur dan sumber daya manusia, yang berdampak pada kualitas dan kecepatan pemutakhiran data (Rohim & Priambodo, 2024).

Data P3KE bersifat statis, jarang diperbarui, dan belum terverifikasi di tingkat lokal, sehingga rawan ketidaktepatan sasaran. Integrasi dengan NIK terbatas, cakupan wilayah tidak menyeluruh, metadata belum lengkap, dan keterlibatan daerah rendah, sehingga menghambat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Data P3KE yang statistik dan tidak diperbarui secara real-time dapat tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, yang dapat menyebabkan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena perubahan kondisi ekonomi rumah tangga tidak segera tercermin dalam data (Ibrahim et al., 2024). Secara ringkas perbedaan data DTKS dan P3KE ditunjukkan oleh tabel 3.

Integrasi Data DTKS dan P3KE untuk Pengentasan Kemiskinan

Melalui integrasi data, pendekatan berdasarkan nama dan alamat memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap individu dan rumah tangga miskin ekstrem. Hal ini menjamin bahwa bantuan sosial diberikan kepada yang paling membutuhkan (Lasari & Ali, 2024).

Hal ini dicapai melalui data integrasi mengenai pengentasan kemiskinan. Selain itu, diperlukan program dan kegiatan konvergensi, perencanaan, program, dan penganggaran. Selain itu, diperlukan koordinasi program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas implementasi program melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan ekstrem (DJPK, 2021). Integrasi DTKS dan P3KE sangat penting karena keduanya memainkan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

Tabel 3. Perbedaan DTKS dan P3KE

Aspek	DTKS	P3KE
Tujuan	Menyediakan data rujukan untuk program perlindungan dan bantuan sosial	Fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia
Lembaga Pengelola	Kementerian Sosial Republik Indonesia	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Sasaran	Rumah tangga/individu miskin dan rentan miskin	Individu/keluarga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem (40% terbawah)
Basis Data	Survei dan verifikasi oleh pemerintah daerah	Integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga menggunakan NIK
Pendekatan	Verifikasi dan validasi oleh desa/kelurahan dan dinas sosial	Berbasis data administrasi kependudukan dan integrasi multisektor
Pemutakhiran Data	Dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah melalui mekanisme usulan	Terpusat, dengan pemutakhiran berdasarkan integrasi dan pembaruan lintas sektor
Penggunaan Program	PKH, BPNT, bantuan lansia, disabilitas, dan bansos lainnya	Digunakan untuk penargetan program penghapusan kemiskinan ekstrem nasional

Tabel 4. Standar Data Kemiskinan

Elemen Data	Tipe Data	Contoh Format	Sumber Utama	Keterangan
NIK	String	3276010101010001	Adminduk (dukcapil)	Identifikasi individu unik nasional
Nomor kartu keluarga (KK)	String (16 digit)	3276010101010002	Adminduk / dtks	Mengelompokkan individu dalam satu keluarga

peran penting dalam penanggulangan kemiskinan. DTKS berfungsi sebagai basis data untuk berbagai program bantuan sosial, sementara P3KE fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam Prinsip Satu Data sesuai Perpres 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ada 4 Tahapan yang terdiri dari Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan data sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Tahapan perencanaan data meliputi identifikasi kebutuhan data, penetapan standar, penentuan sumber data, serta penugasan peran wali, pembina, dan rodusen data untuk mendukung integrasi dan pemanfaatan data kemiskinan secara akurat dan terpadu sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Dengan perencanaan yang baik,

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

Tabel 5. Standar Data Kemiskinan (Lanjutan)

Elemen Data	Tipe Data	Contoh Format	Sumber Utama	Keterangan
Nama lengkap	String	Siti aminah	Adminduk / DTKS / P3KE	Nama sesuai dokumen resmi
Tempat lahir	String	Cilegon	Adminduk	-
Tanggal lahir	Date (yyyy-mm-dd)	1980-05-12	Adminduk	Format iso 8601
Jenis kelamin	Enum (l/p)	P	Adminduk	L = laki-laki, p = perempuan
Status perkawinan	String	Kawin	Adminduk	Untuk data demografis
Alamat lengkap	String	Jl. Merdeka no. 10	DTKS / Adminduk	Alamat tempat tinggal
Kode kelurahan	String	3604012001	BPS	Kode wilayah administrasi
Nama kelurahan	String	Cibeber	BPS / Adminduk	-
Status dtks	Boolean	True/false	DTKS	Apakah termasuk DTKS
Status p3ke	Boolean	True/false	P3KE	Apakah termasuk dalam data P3KE
Desil / kategori ekonomi	String	Desil 1	DTKS / P3KE	Klasifikasi kesejahteraan
Akses air minum layak	Boolean	False	DTKS / SUSENAS	Indikator kemiskinan
Akses sanitasi layak	Boolean	True	DTKS / SUSENAS	-
Status kepemilikan rumah	Enum	Menumpang	DTKS	-
Jenis atap	Enum	Seng	DTKS / SUSENAS	Indikator kondisi rumah
Jenis lantai	Enum	Tanah	DTKS / SUSENAS	-
Jumlah anggota rumah tangga	Integer	5	DTKS / P3KE	Jumlah anggota serumah
Penghasilan rumah tangga	Integer	750000	SURVEI / P3KE	Rupiah per bulan
Status bansos aktif	Enum	PKH	DTKS / KEMENSOS	Jenis bantuan diterima
Lokasi koordinat (lat/lon)	Float	-6.017, 106.034	P3KE / Survei	Data spasial
Tanggal update terakhir	Date	2025-05-29	Semua	Untuk pemutakhiran
Sumber data	String	Gabungan	Metadata integrasi	

proses pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data dapat berjalan efektif dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Salah satu tahapan perencanaan adalah penyusunan standar data untuk mendukung integrasi data kemiskinan, dengan standar data seperti ditunjukkan pada Tabel 5 .

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

1. Tahapan pengumpulan data dalam integrasi data kemiskinan sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mencakup proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, Regsosek, dan Adminduk. Data dikumpulkan oleh produsen data, yaitu instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui survei, pemutakhiran lapangan, atau integrasi sistem elektronik. Selama proses ini, pengumpulan harus memenuhi prinsip standar data dan metadata yang seragam, serta menggunakan kode referensi nasional (seperti NIK). Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diintegrasikan, dibandingkan, dan digunakan secara lintas sektor secara akurat dan konsisten.
2. Tahapan pengumpulan data dalam integrasi data kemiskinan sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mencakup proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, Regsosek, dan Adminduk. Data dikumpulkan oleh produsen data, yaitu instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui survei, pemutakhiran lapangan, atau integrasi sistem elektronik. Selama proses ini, pengumpulan harus memenuhi prinsip standar data dan metadata yang seragam, serta menggunakan kode referensi nasional (seperti NIK). Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diintegrasikan, dibandingkan, dan digunakan secara lintas sektor secara akurat dan konsisten.
3. Tahapan pengumpulan data dalam integrasi data kemiskinan sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mencakup proses pengambilan data dari berbagai sumber seperti DTKS, P3KE, Regsosek, dan Adminduk. Data dikumpulkan oleh produsen data, yaitu instansi pemerintah pusat maupun daerah, melalui survei, pemutakhiran lapangan, atau integrasi sistem elektronik. Selama proses ini, pengumpulan harus memenuhi prinsip standar data dan metadata yang seragam, serta menggunakan kode referensi nasional (seperti NIK). Tujuannya adalah untuk memastikan data yang dikumpulkan dapat diintegrasikan, dibandingkan, dan digunakan secara lintas sektor secara akurat dan konsisten.
4. Tahapan pemeriksaan data dalam integrasi data kemiskinan, mencakup proses verifikasi dan validasi untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan keakuratan data yang dikumpulkan. Pemeriksaan dilakukan oleh wali data dan pembina data melalui pengecekan kesesuaian dengan standar, metadata,

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

dan kode referensi nasional seperti NIK. Data yang tidak valid diperbaiki atau dikembalikan ke produsen data untuk dikoreksi. Proses ini penting untuk menghindari duplikasi, kesalahan sasaran, dan memastikan bahwa data kemiskinan yang digunakan dalam program pemerintah benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

5. Tahapan penyebarluasan data dalam integrasi data kemiskinan merupakan proses distribusi data yang telah diverifikasi kepada instansi terkait dan publik. Penyebarluasan dilakukan oleh walidata melalui platform terbuka seperti portal data nasional atau dashboard sektoral, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Tujuannya adalah agar data kemiskinan yang telah terintegrasi dapat digunakan bersama, mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan yang tepat sasaran. Penyebarluasan juga memastikan bahwa data dapat dimanfaatkan secara luas oleh pengambil kebijakan, peneliti, dan masyarakat.

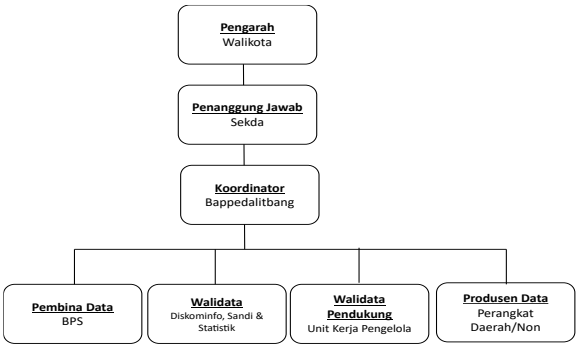
Tim Forum Satu Data

Sesuai Keputusan Walikota Cilegon Nomor 050.05/kep.209-Diskominfo/2022 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Kota Cilegon (lihat Gambar 3), bahwa:

1. Bappedalitbang selaku Koordinator memiliki peran strategis dalam kegiatan integrasi data kemiskinan dalam kerangka Satu Data Indonesia. Perannya meliputi aspek koordinatif, perencanaan, pengawasan kualitas data, serta fasilitator antar instansi daerah. Menjembatani sinergi antara produsen data (seperti Dinsos, Disdukcapil, BPS), walidata (Diskominfo) dan pembina data.
2. Walidata dalam hal Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik memiliki peran penting dalam integrasi data kemiskinan dengan mengoordinasikan pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data antarinstansi. Mereka memastikan data memenuhi standar, dilengkapi metadata, dan menggunakan kode referensi nasional seperti NIK. Selain itu, wali data bertugas memverifikasi dan memvalidasi data untuk menjaga kualitas dan konsistensi. Wali data juga memfasilitasi interoperabilitas antar sistem informasi dan menjamin keterbukaan akses data yang aman. Peran ini mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih akurat, efisien, dan berbasis bukti sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

3. Pembina data berperan menetapkan standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas sistem dalam integrasi data kemiskinan. Mereka memberikan pembinaan teknis kepada produsen dan wali data agar data yang dihasilkan konsisten, valid, dan mendukung penyusunan kebijakan kemiskinan yang tepat sasaran dan berbasis data.



Gambar 3. Tim Forum Satu Data
Sumber: (Pemkot Cilegon, 2022)

4. Produsen data bertugas mengumpulkan, menghasilkan, dan memperbarui data kemiskinan sesuai standar yang ditetapkan pembina data. Mereka memastikan data lengkap, akurat, dan dilengkapi metadata. Produsen data juga berkoordinasi dengan wali data untuk verifikasi dan integrasi, sehingga mendukung penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efisien.

Tantangan

Integrasi data kemiskinan di Indonesia, khususnya antara DTKS dan P3KE, menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Berikut adalah beberapa tantangan utama:

1. DTKS dan P3KE dikembangkan oleh instansi yang berbeda dengan metodologi dan kriteria yang tidak seragam. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dalam identifikasi rumah tangga miskin dan rentan, serta potensi tumpang tindih atau pengabaian dalam penyaluran bantuan sosial (Wahyono et al., 2024).
2. Ditingkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi menghambat proses pemutakhiran dan integrasi data secara efektif. Hal ini berdampak pada kualitas data yang digunakan untuk penyaluran bantuan sosial.
3. Masih terdapat masalah terkait akurasi dan validitas data, seperti duplikasi dan informasi yang tidak terkini, yang dapat mempengaruhi efektivitas program bantuan sosial sehingga berpengaruh terhadap kualitas data.

Solusi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. Standarisasi metodologi dengan menyusun standar nasional untuk metodologi pengumpulan dan

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

pengolahan data agar memudahkan integrasi antar sistem.
2. Peningkatan kapasitas daerah dengan memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan memutakhirkan data.
3. Penguatan infrastruktur teknologi dengan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan mudah diakses untuk mendukung proses sinkronisasi data secara real-time.

Partisipasi masyarakat dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data untuk meningkatkan akurasi dan kepercayaan terhadap data yang digunakan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa integrasi data kemiskinan antara DTKS dan P3KE di Kota Cilegon masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian metodologi dan sistem pengelolaan data antar instansi, lemahnya pembaruan data secara berkala oleh pemerintah daerah, terbatasnya infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses validasi dan verifikasi data. Namun demikian, integrasi kedua sistem data ini terbukti berpotensi besar dalam meningkatkan akurasi penerima manfaat, mengurangi duplikasi, dan memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip Satu Data Indonesia, seperti perencanaan data, standardisasi metadata, dan koordinasi antar-aktor (produsen data, wali data, pembina data) menjadi kunci keberhasilan integrasi data.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil studi ini dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Kota Cilegon perlu mengembangkan dan mengadopsi sistem informasi kemiskinan seperti paltform BANGKIT yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan pendekatan real-time dan berbasis indikator multidimensional.
2. Pemerintah daerah bersama instansi pusat perlu menyusun standar metodologi pengumpulan dan pengolahan data kemiskinan untuk menyatukan DTKS dan P3KE dalam satu sistem nasional.
3. Pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas SDM, infrastruktur teknologi, dan interoperabilitas sistem

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

untuk menjamin kualitas data yang valid, mutakhir, dan aman.

4. Verifikasi dan validasi data perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat guna memperkuat kepercayaan terhadap keakuratan data dan efektivitas penyaluran bantuan.
5. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap implementasi integrasi data untuk mengidentifikasi celah dan perbaikan berkelanjutan dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
6. Penguatan regulasi lokal seperti Peraturan Walikota tentang integrasi data kemiskinan serta evaluasi berkala efektivitas integrasi data dan pelacakan perubahan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, M. B. I. (2024). Bappenas tekankan urgensi integrasi data antar-K/L program bansos. *Antara News*.

Amirudin, M. D., Ryan, M., Hidayat, R., & Bandung, U. M. (2024). *Angka Kemiskinan di Kecamatan Lemahsugih , Kabupaten Majalengka*. *14*(2), 166–175.

Ani, J., Lumanauw, B., & Tampenawas, J. L. A. (2021). Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado the Influence of Brand Image, Promotion and Service Quality on Consumer Purchase Decisions on Tokopedia E-Commerce in Manado. *663 Jurnal EMBA*.

Aryani, L. (2024). *Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*. 1–12.

BPS Kota Cilegon. (2025). *Statistik Menurut Subjek: Lingkungan*. BPS Kota Cilegon.

Dinas Sosial Kota Cilegon. (2024). *Laporan Monitoring dan Evaluasi*.

Humas Menpan RB. (2025). *Akselerasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional , Menteri Rini : Perkuat Tata Kelola Integrasi Data Berbasis Digital*. https://menpan.go.id/site/berita-terkini/akselerasi-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-menteri-rini-perkuat-tata-kelola-integrasi-data-berbasis-digital

Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Umaternate, R., & Taufiqurrokhman, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024. *Menara Ilmu*, *18*(1), 76–85. https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5554

Kemenko PMK. (n.d.). *Sebaran data P3KE*. 2024. https://p3ke.kemenkopm.go.id/sebaran

Lasari, D., & Ali, H. (2024). Strategi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, *9*(1), 2024–2036.

Novitri, A., Hasibuan, R., Putri, S. A., Hasibuan, S. R., & Pramita, F. (2024). *Analisis Kesesuaian Anggota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Indikator Kemiskinan di Kota Medan Analysis of Compatibility of Bpjs Members Recipienting Contribution Aid (PBI) With*

Vol. 9 No. 1 | Juni 2025 | Hal. 48–63
p-ISSN: 2597-4971 | e-ISSN: 2685-0079 | DOI: 10.56945/jkpd.v9i1.367

Poverty Indicators In Medan City. *7*(5), 1556–1561. https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5075

Pemkot Cilegon. (2022). *Keputusan Walikota Cilegon Tentang Pembentukan Tim Forum Satu Data Kota Cilegon*.

Rohim, A. B., & Priambodo, B. (2024). *Implementasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Oleh Dinas Sosial Kabupaten Gresik*. *4*(November), 8–16.

Sugandi, A. (2025). Integrasi Data Kemiskinan: BPS dan Kemensos di Persimpangan Tugas. *Republika.Co.Id*, 1.

Sujoko, A. (2024). *Evaluasi Dampak Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan*. *December 2024*.

Ulita, A. S., & Wati, C. H. S. (2024). Sustainability Development Goals (SDGs): Kemiskinan Dan Kelaparan. *Musamus Accounting Journal*, *6*(2), 49–54. https://doi.org/10.35724/maj.v6i2.6221

Wahyono, E., Solekhah, N., Imron, D. K., Hakim, F. N., Mardiyanto, A., Pramono, A., Nugroho, A. E., & Humaedi, M. A. (2024). *Ethnostatistics of Single Integrated National Database : A Reflection on the National Program of Socioeconomic Registration for Social Protection Programs in Indonesia*. *11*(3), 315–330.

Wardah, E., & Muhammad, E. (2023). *Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dalam Bantuan Sosial Pada Masyarakat Miskin Cianjur*. *03*(02).

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu Kemiskinan Secara Berkelanjutan Dan Berkualitas: Pembelajaran Dari Studi Kasus Di Enam Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, *31*(2), 21–42. https://doi.org/10.55981/jep.

Yuliani Wiwin. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling*. https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497

Zulfah, Mumtahanah, & Husnussaadah. (2022). *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Praktik* (Issue Januari).